



**SENIN, 07 MEI 2018**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

# Jaksa Lakukan Penyidikan

## Kasus TPP Seluma

**BENGKULU** - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk perkara dugaan korupsi dana Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Seluma tahun 2017. Nilainya mencapai Rp 50 miliar. Dimana dalam perkara ini ada indikasi kerugian negara mencapai Rp 12 miliar.

Diungkapkan Kajati Bengkulu Baginda Polin Lumban Gaol, SH, MH melalui Aspidsus Henri Nainggolan, SH, MH, berdasarkan hasil pertemuan dengan Biro Hu-

kum Kemendagri pada pekan lalu, ada saksi ahli yang mengatakan pengucuran TPP tersebut menyala-ahi aturan di Kemendagri.

"Sekarang kami tinggal menunggu instruksi langsung dari Kajati Bengkulu terkait sprindiknya. Mungkin dalam waktu dekat ini setelah beliau kembali dari dinas luar di Palembang, sprindiknya sudah bisa dikeluarkan," terang Henri.

Hasil konsultasi tim dengan Biro Hukum Kemendagri, kata Hendri, sudah ada keterangan dari salah ahli yang membidangi terkait dengan peraturan Kemendagri, atau orang yang mengerti masalah Peraturan Pemerintah (PP) terkait

dengan pengucuran TPP tersebut.

"Yang jelas ada aturan yang ditabrak oleh Pemkab Seluma dalam pencairan TPP. Karena dalam pencairan harusnya sesuai dengan peraturan Kemendagri dan Peraturan Pemerintah," jelasnya.

Diketahui, sebelumnya besaran TPP di lingkungan Pemkab Seluma mendapat aksi protes. Gejolak protes besaran TPP ini setelah kesenjangan di OPD yang bertipe A dan C. Pasalnya, besaran TPP pada OPD yang termasuk dalam TP4D, seperti jabatan Kepala Bidang (Kabid) di salah satu OPD yang besaran TPP nya mencapai

Rp 14 juta, bahkan ada yang Rp 16 juta. Tentunya lebih besar dari Kepala OPD tipe A seperti di Dinas PU yang hanya menerima TPP sebesar Rp 13 juta. Bahkan dari informasi yang disampaikan untuk Kepala Bagian (Kabag) di lingkungan Sekretariat Pemkab Seluma menerima TPP sebesar Rp 12 juta setiap bulannya.

Untuk tahun 2018 ini, informasi yang dihimpun RB, besaran pagu anggaran untuk pembayaran TPP tahun 2018 adalah sebesar Rp 65 miliar. Hal ini tentunya akan kembali memperuncing polemik kesenjangan hak ASN di Kabupaten Seluma. (sly)